

PROGRAM PENINGKATAN MUTU GURU BERBASIS KEBUTUHAN

Dwi Esti Andriani

E-mail: dwiesti@yahoo.com

Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No. 1 Sleman Yogyakarta

Abstract: Quality Teacher Improvement Programs Based on Need Assessment. Effective quality teacher improvement programs should be based on need assessment. This study aims to describe teacher quality improvement programs based on teachers' needs. The research findings showed there are two programs needed to improve the quality of Junior High School teachers in Banyumas. Teachers need a program to improve their academic qualification. Based on teachers' need, the program should consider following aspects. Firstly, the program should offer undergraduate program (S1) and graduate program (S2) in education field and relevant with the subjects that teachers teach. Secondly, the program should take place near or within location in which teachers live. Thirdly, the program needs to provide supports for teachers such as funding for studying – tuition fee and operational costs – , and study permit or dispensation for teachers to be free of or to reduce their teaching hours. The other program is programs to improve teachers' competencies. The programs also should be conducted in a location where teachers live in or near by. Besides that, teachers need some supports such as money and also permit to join the programs.

Abstrak: Program peningkatan mutu guru yang efektif harus didasarkan pada *need assessment*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program peningkatan kualitas guru berdasarkan kebutuhan guru. Temuan penelitian menunjukkan ada dua program yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru-guru SMP di Banyumas. Guru membutuhkan sebuah program untuk meningkatkan kualifikasi akademik mereka. Berdasarkan pada kebutuhan guru, program ini harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Pertama, program harus menawarkan program sarjana (S1) dan program pascasarjana (S2) di bidang pendidikan dan relevan dengan mata pelajaran yang guru mengajar. Kedua, program harus mengambil tempat di dekat atau di dalam lokasi di mana guru tinggal. Ketiga, program harus memberikan dukungan bagi guru seperti pendanaan untuk mempelajari - biaya kuliah dan biaya operasional, dan izin belajar atau dispensasi bagi guru untuk bebas dari atau untuk mengurangi jam mengajar mereka. Program lainnya adalah program untuk meningkatkan kompetensi guru. Program yang harus dilakukan di lokasi di mana guru tinggal di atau dekat. Selain itu, guru perlu beberapa mendukung seperti uang dan juga mengizinkan untuk bergabung dengan program.

Kata kunci: guru, kualitas guru, peningkatan guru

Pendidikan merupakan kunci kemajuan dan keunggulan bangsa. Melalui pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia cakap yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Hasil studi Heyneman dan Loxley dalam (Supriadi, 1999) di 29 negara menemukan bahwa di antara berbagai masukan (*inputs*) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa), ditentukan oleh guru. Peranan guru sangatlah penting dalam keterbatasan sarana dan prasarana di negara berkembang. Terbukti pada 16 negara berkembang guru memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18%, sarana fisik

26%. Sedangkan 13 negara industri kontribusi guru adalah 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana fisik 19%

Pemerintah mengembangkan dan menetapkan standar mutu guru melalui UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan UU tersebut, seorang guru profesional harus memiliki: kualifikasi akademik yang memadai, menguasai standar kompetensi guru, lolos sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Seorang guru yang memenuhi standar mutu

guru diharapkan mampu mewujudkan pembelajaran yang efektif dan juga menjadi pembelajar sepanjang karir dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan.

Guna memenuhi standar mutu guru tersebut, pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan mutu guru. Terlebih, berdasarkan hasil penelitian, Joni (2006) mengungkapkan bahwa jumlah guru serta kelayakan mengajar guru sekolah menengah dilihat dari tingkat pendidikan dan juga bidang spesialisasinya atau kompetensiyamasih belum memenuhi standar mutu guru. Kondisi ini diperburuk dengerterjadinya salah kamar dalam penugasan guru. Program peningkatan mutu guru seperti pendidikan, pengembangan dan pelatihan guru membutuhkan biaya besar sehingga perlu diupayakan keefektifannya dengan melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan memberikan informasi tentang pengetahuan dan keterampilan guru yang perlu ditingkatkan. Analisis kebutuhan akan menghindarkan terjadinya program peningkatan mutu guru yang tidak tepat, baik dilihat dari sasaran, materi, maupun tujuan.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana penguasaan kompetensi guru SMP se-Kabupaten Banyumas? dan 2) Seperti apakah program peningkatan mutu guru berdasarkan kebutuhan guru SMP se-Kabupaten Banyumas? Tujuannya untuk memperoleh peta kompetensi guru SMP se-Kabupaten Banyumas dan alternatif program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan guru.

KAJIAN PUSTAKA

Guru Profesional Abad 21

Guru profesional abad 21 bukanlah guru yang sekedar mampu mengajar dengan baik. Guru profesional abad 21 adalah guru yang mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan; mampu bekerja dengan, belajar dari, dan mengajar kolega sebagai upaya menghadapi kompleksitas tantangan sekolah dan pengajaran; mengajar berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran; serta memiliki berkomunikasi baik langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua murid untuk mendukung pengembangan sekolah (Hargreavas, 1997, 2000; Darling, 2006).

Berkembangnya tuntutan profesionalitas guru tersebut dipicu oleh perubahan lingkungan sekolah yang begitu cepat. Pada abad 21, terjadi transformasi besar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Hargreaves, 1997, 2000) yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, perubahan demografi, globalisasi dan lingkungan (Hargreaves, 1997, 2000; Beare, 2001; Mulford, 2008). Akibatnya, guru saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Guru menghadapi klien seperti orang tua murid, siswa, warga masyarakat yang jauh lebih beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standard proses pembelajaran dan juga tuntutan kompetensi lulusan yang lebih tinggi (Darling, 2006).

Selain itu, sejak akhir abad 20 hampir sebagian besar negara di dunia memilih pendekatan ekonomi pasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah (Beare, 2001). Sekolah diperlakukan layaknya perusahaan yang menyediakan produk (pembelajaran) kepada konsumennya (siswa dan orang tua). Sekolah diharapkan memberikan kontribusi pada daya kompetisi ekonomi bangsa. Sekolah harus 'menjual diri mereka', menemukan 'tempat' di pasar dan berkompetisi. Sekolah dituntut responsif pada komunitas lokal mereka melalui beragam pendekatan yang memungkinkan konsumen memilih layanan sekolah yang akan mereka beli. Sekolah diperlakukan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri - privatisasi pendidikan- yang diberi kewenangan mengelola sekolah mereka secara mandiri (*self managing*) dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara profesional kepada *stakeholders*. Sekolah-sekolah berkompetisi untuk memperoleh sumber dana terutama dari pemerintah. Sekolah yang menyediakan 'produk' yang laku di pasar dinilai lebih layak untuk berkembang, dan sebaliknya, sekolah yang menyediakan 'produk' yang buruk – tidak laku- akan ditinggalkan. Implikasinya bagi para guru yaitu tuntutan kemampuan memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan nilai tambah pada siswa-siswanya agar sekolahnya kompetitif dan unggul.

Kebijakan Peningkatan Mutu Guru

Guru merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang menentukan keberhasilan pendidikan. Seburuk apapun kualitas sumber daya sekolah, proses belajar mengajar masih tetap bisa berjalan sepanjang ada guru yang mengajar dan

siswa yang belajar. Proses belajar mengajar yang berjalan akan berkualitas jika guru mampu kreatif mendayagunakan sumber daya sekolah dan lingkungannya guna menunjang keefektifan proses belajar siswa-siswanya.

Menyadari peran penting guru dan berkembangnya tuntutan profesionalitas guru di abad 21, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk peningkatan mutu guru. Salah satu kebijakan yang mendasar yang memayungi berbagai kebijakan peningkatan mutu guru adalah penetapan standar mutu guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Standar Kompetensi Guru. Mengacu pada perundang-undangan tersebut, kriteria kompetensi guru profesional tidak lagi terbatas pada penguasaan kompetensi mengajar atau pedagogik, namun juga pada kemampuan untuk mengembangkan profesionalitas secara terus menerus, kemampuan menjadi agen pembelajar, membuat karya ilmiah bidang pendidikan, dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Guru juga dituntut mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam kompetensi sosial serta memiliki kepribadian yang baik sebagaimana dideskripsikan pada kompetensi pribadi.

Selain itu, guru juga harus memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya. Kualifikasi akademik adalah jenjang dan bidang studi tertentu yang dimiliki guru untuk mampu menjalankan tugas keprofesionalannya dengan baik. Adapun standar kualifikasi akademik untuk guru SMP yaitu minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk SMP/MTS.

Penguasaan standar kompetensi guru dan juga pemenuhan standar kualifikasi guru dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah pengakuan formal bahwa seorang guru telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sertifikat pendidik diperoleh dari sertifikasi yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh PT yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi (pemerintah, masyarakat). Bagi guru yang telah memegang

sertifikat pendidik, ia berhak menyandang status guru profesional yang diharapkan mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar yang efektif.

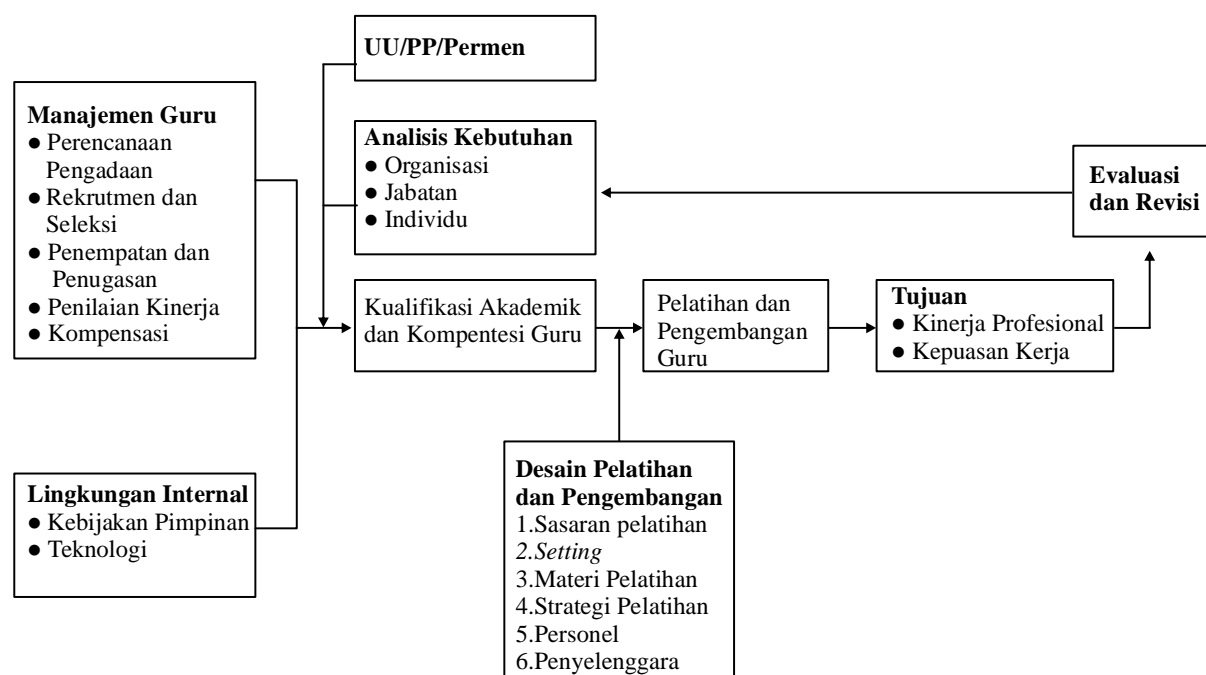
Pengembangan Program Peningkatan Mutu Guru

Guru bermutu adalah guru yang memenuhi atau melampaui standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Ketersediaan guru bermutu perlu diupayakan melalui berbagai program seperti pendidikan (studi lanjut), pengembangan dan pelatihan guru. Sondang (2002) mengatakan pengembangan mutu sumber daya manusia penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas; memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pegawai untuk dapat fleksibel dan adaptif dengan strategi dan teknologi baru; memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan personel jika diberi tugas yang belum pernah dilakukannya; meng-*upgrade* pengetahuan dan keterampilan personel yang telah usang akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Supaya efektif, peningkatan mutu guru seperti pendidikan, pelatihan dan pengembangan hendaknya menjadi bagian integral dalam proses manajemen ketenagaan guru sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.

Perencanaan pengadaan guru merupakan kegiatan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi guru yang dibutuhkan organisasi serta penetapan berbagai kebijakan/program untuk memenuhinya. Rekrutmen dan seleksi merupakan proses untuk mengadakan dan mendapatkan guru dengan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan. Perencanaan pengadaan, rekrutmen, dan juga seleksi menghasilkan informasi tentang kondisi guru baru maupun lama dari aspek jumlah dan juga mutunya. Informasi ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam mendesain program pengembangan dan pelatihan guru. Selanjutnya peningkatan pengetahuan dan kompetensi guru karena partisipasi guru dalam kegiatan peningkatan mutu guru hendaknya diperhatikan dalam kegiatan penempatan, penugasan, penghargaan, pemberian kompensasi, dan penilaian kinerja guru.

Program peningkatan mutu guru hendaknya didesain berdasarkan analisis kebutuhan yang dilaksanakan sebelum implementasi program. Hal ini penting dilakukan agar program peningkatan



Gambar 1 Hubungan antara Pengembangan dan Pelatihan dengan Manajemen Ketenagaan Guru (Dimodifikasi dari Schuller: 1989)

mutu guru tepat sasaran, efektif dan efisien, dilihat dari materi, metode, tempat, pendekatan pembelajaran, dan sumber daya (Cattetter, 1996). Gambar 2 mengilustrasikan kerangka desain program pelatihan dan pengembangan guru yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Sampel penelitian dipilih secara acak pada 607 guru SMP se-Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan angket tertutup dan terbuka. Untuk validasi instrumen, dilakukan validasi isi dan konsultasi pada ahli. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

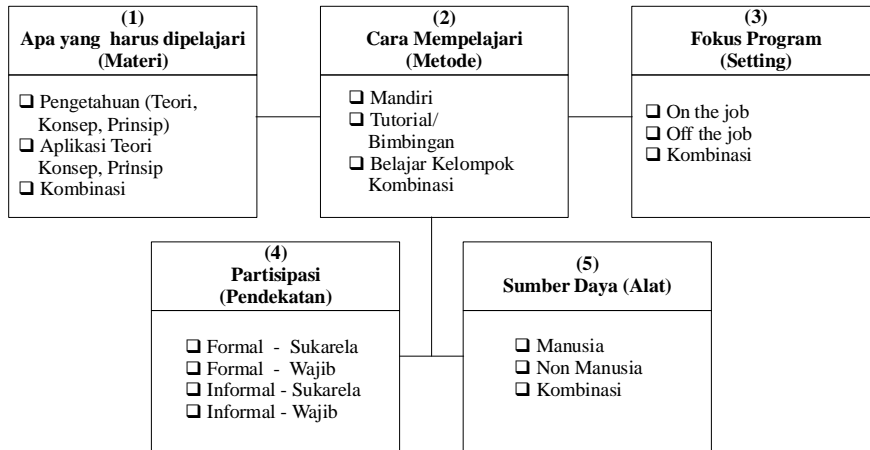
Penguasaan Kompetensi Guru SMP se-Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui profil guru SMP se-Kabupaten Banyumas sebagai berikut. Dilihat dari masa kerja dan karir guru, semua guru mulai dari yang masa kerjanya belum lama, yaitu 1-7 tahun hingga yang masa kerjanya telah lama, yaitu e" 31 tahun masih mengalami kesulitan untuk naik golongan e" IV/b. Mengacu

pada peraturan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru, kenaikan golongan dari IV/a ke IV/b mensyaratkan karya tulis ilmiah guru. Dengan kata lain, data tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak guru yang mengalami kesulitan membuat karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, para guru membutuhkan program/kegiatan diklat, *shourcourse*, dan sejenisnya untuk meningkatkan kompetensi membuat karya ilmiah. Terlebih, capaian kompetensi penulisan karya ilmiah guru masih berada dalam kategori kurang kompeten.

Dilihat dari kualifikasi akademik, sebagian besar responden, yaitu 566 orang (93,2%) telah memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan, yaitu berpendidikan minimal D4/S1, 13 orang diantaranya (2,1%) telah melampaui standar yang ditetapkan, yaitu berpendidikan S2 518 orang (85,3%) berpendidikan sesuai persyaratan dan relevan dengan bidang ajarnya. Dikaitkan dengan masa kerja, diketahui bahwa guru yang masa kerjanya sebentar (1-7 tahun) telah berpendidikan S1. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan guru saat ini telah memperhatikan standar kualifikasi guru. Hal ini mungkin agak sulit dilakukan di masa lalu disaat jumlah lulusan guru belum banyak, dan masih sedikit orang yang berminat menjadi guru di daerah. Oleh karenanya, ditemukan guru-guru lama yang berusia tua belum memenuhi standar kualifikasi akademik.

Framework Mendesain Rencana Pelatihan dan Pengembangan



Gambar 2 Framework Desain Rencana Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

Dilihat dari kesesuaian kualifikasi akademik dengan bidang ajar, sebagian besar guru, yaitu 518 orang (85,3%) memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang ajarnya. Ketidakesesuaian kualifikasi akademik dengan bidang ajar lebih banyak ditemukan pada guru yang masa kerjanya telah lama yaitu 24 sampai dengan 30 tahun yaitu sebanyak 31 guru (5,1%). Hal ini mungkin disebabkan karena di masa lalu jumlah dan kualifikasi guru yang tersedia tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah. Akibatnya, prinsip *the right man on the right place* dalam penempatan dan penugasan guru sulit diimplemetasikan. Namun, dilihat dari jam mengajar guru per minggu, diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 248 guru (56,1%) memiliki jam mengajar 24 jam per minggu. Ini mengindikasikan bahwa ada kesesuaian antara jumlah guru dan kebutuhan guru di sekolah.

Penguasaan kompetensi guru guru SMP se-Kabupaten Banyumas

Penguasaan kompetensi guru berada pada kategori cukup. Data menunjukkan bahwa 15 orang (2,5%) berada pada kategori sangat kurang kompeten, dan 72 orang (11,9%) kurang kompeten, dan tak seorang pun guru berada dalam kategori sangat kompeten. Walaupun demikian, sebagian besar guru yaitu 125 orang (20,6%) termasuk dalam kategori kompeten, dan 395 (65,1%) termasuk dalam kategori cukup kompeten. Penguasaan kompetensi guru ini dilihat dari tiga

aspek kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi pembuatankarya tulis ilmiah.

Penguasaan guru terhadap kompetensi pedagogik berada pada kategori cukup. Hanya sedikit guru, yaitu 5 orang (0,8%) berada pada kategori sangat kurang kompeten. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan guru untuk mampu mewujudkan proses belajar mengajar yang berkualitas. Kompetensi pedagogik diasah oleh guru ketika melaksanakan tugas mengajarnya. Kompetensi pedagogik guru yang berada pada kategori cukup mengindikasikan guru telah cukup mampu memahami karakter dan kemampuan belajar siswanya, merancang dan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, memanfaatkan TIK untuk keperluan proses belajar mengajar, dan berkomunikasi simpatik dengan orang lain, khususnya siswa dan rekan guru. Guru cukup mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas mengajarnya walaupun solusi atau tindakan yang diambil kadang kala belum cukup efektif.

Penguasaan kompetensi pedagogik yang baik membutuhkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan seperti filsafat pendidikan, ilmu pendidikan, teori perkembangan psikologi peserta didik, berbagai pendekatan dalam mengajar, model-model pembelajaran, inovasi pendidikan, pengembangan kurikulum, keterampilan dasar mengajar, dan lain-

lain disertai kemampuan mengaplikasikannya dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, guru membutuhkan peluang dan kesempatan mengikuti berbagai bentuk kegiatan pendidikan dan atau pelatihan guna meng-'update' dan mengembangkanilmupengetahuan dan keterampilannya.

Penguasaan kompetensi profesional guru jugatermasuk dalam kategori cukup. Sebagian besar guru yaitu 352 orang (58,0%) berada pada kateori cukup, dan 140 guru (23.5%) berada pada kategori kompeten. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan substansi materi mata pelajaran yang diampu dan keprofesionalan guru. Kategori cukup kompeten mengindikasikan bahwa guru telah cukup: 1) menguasai substansi (materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmiah) mata pelajaran yang diampu, 2) memahami ilmu pengetahuan bidang lain yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu, 3) mengembangkan dan mengolah materi sesuai dengan perkembangan siswa dan lingkungan, 4) memahami kompetensi dan tujuan yang akan dicapai dari mata pelajaran yang diajarkan, dan 5) melakukan penelitian tindakan kelas. Khusus untuk kemampuan mengembangkan keprofesionalan secara mandiri, hasil penelitian menunjukkan berada pada kategori cukup kompeten.

Penguasaan kompetensi profesional tersebut teraktualisasikan pada saat guru mengajar. Dengan pencapaian kompetensi profesional pada kategori cukup, guru kadang-kadang masih mengalami kesulitan dalam upaya merancang dan juga melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas yang dapat mendorong kreativitas dan perkembangan kecerdasan siswa secara optimal. Jika kondisi ini berlangsung terus menerus, pencapaian tujuan pendidikan belum dapat tercapai secara optimal.

Untuk menguasai kompetensi profesional, guru perlu mengikuti berbagai program diklat, seminar, *workshop*, dan sebagainya dan juga program pendidikan formal minimal S1 yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu bagi yang belum sarjana. Program pendidikan formal minimal S1 ini sangat dibutuhkan untuk pencapaian kemampuan memahami substansi mata pelajaran yang diampu dan juga ilmu pengetahuan bidang lain yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Penguasaan substansi mata pelajaran dan pengetahuan bidang lain yang relevan sangat dibutuhkan guru terutama saat mengembangkan dan mengorganisir materi yang dilanjutkan dengan

menyusun rencana pelaksanaan pengajaran, memilih model, strategi, media pendidikan yang tepat, mengembangkan instrumen evaluasi belajar, dan juga melakukan penelitian yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu.

Guru profesional dan berprestasi disyaratkan memiliki kompetensi membuat karya tulis ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi guru membuat karya tulis ilmiah berada dalam kategori kurang. Dari jumlah total responden, hanya sebagian kecil guru yaitu 70 orang (11,5%) memiliki kompetensi membuat karya ilmiah. 235 orang (38.7%) berada dalam kategori kurang kompeten. Data ini mendukung data profil guru pada aspek karir guru (golongan dan ruang) yang menunjukkan bahwa tidak satupun guru (0%) mencapai golongan e" IV/b. Hal ini karena untuk dapat mencapai IV/ b, seorang guru dituntut mampu membuat karya tulis ilmiah.

Program peningkatan mutu guru berbasis kebutuhan guru

Program peningkatan mutu guru SMP se-kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 3 tahun beragamseperti: Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), pelatihan *contextual teaching and learning*, diklat multimedia, diklat sekolah berstandar nasional, dan bintek kepala sekolah. Namun, frekwensi, tujuan, dan sasaran peserta pelatihan dalam penyelenggaraan program-program tersebut masih perlu peninjauan kembali dan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil guru yaitu 67orang (11%) yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi mengajar e" 4 kali dalam satu tahun; dan angka yang lebih kecil ditemukan pada keikutsertaan dalam pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah yaitu 9 orang (1,5%). Sebagian besar guru mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi mengajar hanya 2 kali dalam 1 tahun dan ≤ 1 kali setahun. Peluang guru untuk mengikuti program peningkatan mutu guru yang masih sedikit ini perlu ditingkatkan. Terlebih, beban mengajar 24 jam per minggu memungkinkan guru mengikuti program peningkatan mutu guru.

Selain itu, relevansi program/kegiatan peningkatan mutu guru dengan kebutuhan guru juga masih perlu ditingkatkan agar efektif. Lebih dari separuh guru yaitu 399 orang (65.8%) mengatakan bahwa program/kegiatan peningkatan mutu guru

SMP se-Kabupaten tidak pernah relevan dengan kebutuhan mereka, hanya 7 orang (1.2%) mengatakan kadang-kadang relevan, dan tak satupun guru (0%) mengatakan selalu relevan.

Semua guru, yaitu 607 orang (100%) mengatakan membutuhkan program peningkatan mutu guru. Bentuk program mulai dari yang paling diminati hingga kurang diminati yaitu diklat oleh 523 guru (59,8%), kemudian lokakarya oleh 121 orang (13,8%), seminar oleh 106 orang (12,1%), *shortcourse* (1-3 bulan) oleh 77 orang (8,8%), dan lain-lain. Adapun sasaran kompetensi yang dibutuhkan sebagian besar guru yaitu 281 orang (46,4%) adalah peningkatan penguasaan substansi bidang studi/mapel yang diajarkan. 229 orang (37,9%) membutuhkan pengembangan pada aspek penguasaan kompetensi keguruan atau keterampilan mengajar, dan hanya 95 orang (15,7%) menginginkan peningkatan kompetensi pembuatan karya tulis ilmiah. Terkait dengan aspek perizinan mengikuti program peningkatan kompetensi guru, sebagian besar guru yaitu 547 (74,6%) tidak mendapatkan kesulitan. Hanya sebagian kecil guru, yaitu 50 orang (8,3%) yang mengatakan tidak mendapatkan izin. Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru diharapkan oleh sebagian besar guru, yaitu 546 orang (91%) berlokasi di daerah sendiri. Adapun dukungan utama yang sebagian besar guru harapkan adalah dana sebesar 452 guru (75,3%) dan sebagian besar guru yaitu 437 orang (72%) mendapatkan bantuan dana dari sekolahnya ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perluasan informasi dan tawaran studi lanjut S1 dan S2 bagi guru masih perlu ditingkatkan. Hanya 20% guru yang mengatakan diberi tawaran untuk melanjutkan studi S1. Padahal sebagian besar guru yang masih berpendidikan SMA yaitu 381 orang (62,3%) mengatakan perlu studi lanjut S1 dan hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa tak ada satu pun guru (0%) yang memiliki keinginan meningkatkan kualitas akademik ke jenjang S2. Program studi lanjut bagi guru sebaiknya memilih perguruan tinggi yang lokasinya berada dekat atau satu wilayah dengan guru agar efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru yaitu, 538 orang (90,0%) memilih studi lanjut di daerah sendiri. Selain itu, mereka juga membutuhkan beragam dukungan seperti dana studi, pemberian izin tugas belajar, dan juga fasilitas studi misalnya biaya operasional selama studi dan juga dispensasi tugas mengajar jika masih harus mengajar. Dari ketiga

bantuan yang diharapkan tersebut, bantuan dana studi merupakan bantuan yang paling diharapkan oleh sebagian besar guru yaitu 525 orang (87%).

Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, dapat diidentifikasi dua program peningkatan mutu guru SMP se-kabupaten Banyumasyang dibutuhkan yaitu: a) program peningkatan kualifikasi akademik guru SMP, dan b) program peningkatan kompetensi guru SMP.

Program peningkatan kualifikasi akademik guru SMP

Program peningkatan kualifikasi akademik melalui studi lanjut dibutuhkan oleh sebagian besar guru SMP se-Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari guru, komponen-komponen program peningkatan kualifikasi akademik guru mencakup: jenjang pendidikan, program studi, lokasi, dan sumber daya pendukung. Studi lanjut yang dibutuhkan guru yaitu kelanjutan studi D3 ke S1, studi S1 bagi yang masih berijazah SMA, dan studi lanjut S2 bagi yang telah S1. Adapun program studi yang dibutuhkan adalah program studi kependidikan sesuai bidang ajar guru. Lokasi studi lanjut adalah universitas/institut pendidikan yang dekat dengan daerah dimana guru tinggal. Sumber daya pendukung yang dibutuhkan mencakup: bantuan dana pendidikan dan dana operasional selama studi lanjut, serta izin studi.

Program peningkatan kompetensi guru

Program peningkatan kompetensi guru dibutuhkan oleh semua guru SMP se-Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari guru, komponen-komponen program kompetensi guru yang perlu diperhatikan mencakup: sasaran kompetensi, bentuk program, lokasi, dan sumber daya pendukung. Sasaran kompetensi yang perlu ditingkatkan pada diri guru mencakup kompetensi pedagogik, profesional, dan pembuatan karya tulis ilmiah. Memperhatikan variasi tingkat penguasaan kompetensi guru dan juga aspek kompetensi yang perlu dikembangkan, penetapan peserta program hendaknya didahului dengan analisis kebutuhan. Bentuk program dapat berupa diklat, *shortcourse* (1 s.d. 3 bulan), *workshop*, lokakarya, penataran, seminar, dan sebagainya dengan prioritas pilihan yaitu diklat. Program pelatihan dilaksanakan di daerah guru tinggal. Peserta mendapatkan izin dan bantuakn dana untuk mengikuti pelatihan.

KESIMPULAN

Program peningkatan mutu guru dibutuhkan oleh para guru SMP se-Kabupaten Banyumas. Program ini hendaknya berbasis pada kebutuhan guru agar efektif. Program Peningkatan Mutu Guru SMP se-Kabupaten Banyumas yang dibutuhkan guru mencakup 1) program peningkatan kualifikasi akademik dan 2) program peningkatan kompetensi guru. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan mencakup: bentuk program, relevansi program, dan sumber daya pendukung bagi peserta untuk mengikuti program.

Program peningkatan kualifikasi akademik guru SMP berbasis kebutuhan mencakup: program penyeteraanan D3 ke S1, studi lanjut S1 dan S2. Studi lanjut dilaksanakan di daerah sendiri dan peserta mendapatkan bantuan biaya pendidikan, biaya operasional selama mengikuti pendidikan, dan ijin/penugasan studi lanjut. Sedangkan program peningkatan kompetensi guru SMP berbasis

kebutuhan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan didasarkan pada hasil analisis kebutuhan. Bentuk program yang diprioritaskan adalah diklat yang dilaksanakan di daerah guru. Dukungan izin dan bantuan dana akan membantu peserta mengikuti program dengan baik. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pengembangan dan implementasi program peningkatan mutu guru selalu melalui tahap-tahap analisis kebutuhan, kemudian pengembangan desain atau rencana, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, serta dipadukan dengan manajemen guru. Oleh karenanya, perlu koordinasi dan kerjasama antar lembaga penyelenggara program peningkatan mutu guru. Sekolah-sekolah hendaknya memberikan dukungan baik moril maupun materil bagi para guru mereka yang berkeinginan melanjutkan studi dan mengikuti program peningkatan penguasaan kompetensi guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Beare, H. 2001. *Creating the Future School*. London. Routledge Falmer.
- Castetter, W. B. 1996. *The Personnel Function in Education Administration Sixth Edition*. New York: Mac Millan Publishing Co.
- Darling, L. H. 2006. Constructing 21st Century Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 57: 300-314.
- Supriadi, D. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Adicita Karya Nusantara.
- Dessler, dan Gary. 2006. *Manajemen Sumber Manusia Jilid 1 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Indeks.
- Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen PMPTK Depdiknas. 2007. *Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hargreaves, A. 1997. The Four Ages of Professionalism and Professional Learning. *Unicorn*, 23(2): 86-114.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. 2000. Mentoring in the New Millennium. *ProQuest Education Journals*, 39(1): 50-56.
- Joni, R. T. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Mulford, B. 2008. *The Leadership Challenge: Improving Learning in Schools*. Australian Education Review. Victoria: ACER Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Schuller, R., & Jackson, S. E. 1987. *Personal and Human Resources Management*. New York: West Publishing Company.
- Siagian, P. S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.